

**KETERKAITAN *SARBANES-OXLEY ACT*,
SAS NO. 99, DAN *CORPORATE GOVERNANCE*:
HAL-HAL APA SAJA YANG PERLU KITA KETAHUI**

M.N. Huda D. Santoso, Ak., M.H., CFE

Salah satu topik yang menarik dan aktual (*current issues*) dalam *ACFE Annual Fraud Conference* ke-14 di Chicago yang baru lalu adalah tentang diterbitkannya *Sarbanes-Oxley Act* (SOX). Undang-undang ini dipandang sebagai reformasi terbesar (di USA) bagi pengukuran *corporate governance* sejak diterbitkannya *Securities Acts of 1933 and 1934*. Sangatlah penting bagi para akuntan, auditor dan *fraud examiners* untuk mempelajari undang-undang ini, dan juga SAS No. 99, agar mengetahui pengaruhnya bagi organisasi (baik publik, swasta, maupun jenis organisasi yang lain); serta apa saja tanggung jawab baru yang harus dipikul sekarang.

SARBANES-OXLEY ACT

Latar Belakang

Undang-undang ini diprakarsai oleh Senator Paul Sarbanes (Maryland) dan Representative Michael Oxley (Ohio), dan telah ditandatangani oleh Presiden George W. Bush pada tanggal 30 Juli 2002. Undang-undang ini dikeluarkan sebagai respons dari Kongres Amerika Serikat terhadap berbagai skandal pada beberapa korporasi besar seperti: Enron, WorldCom (MCI), AOL TimeWarner, Aura Systems, Citigroup, Computer Associates International, CMS Energy, Global Crossing, HealthSouth, Quest Communication, Safety-Kleen dan Xerox; yang juga melibatkan beberapa KAP yang termasuk dalam “*the big five*” seperti: Arthur Andersen, KPMG dan PWC.¹ Semua skandal ini merupakan contoh tragis bagaimana *fraud schemes* berdampak sangat buruk terhadap pasar, *stakeholders* dan para pegawai.²

Dengan diterbitkannya undang-undang ini, ditambah dengan beberapa aturan pelaksanaan dari *Securities Exchange Commission (SEC)* dan beberapa *self regulatory bodies* lainnya, diharapkan akan meningkatkan standar akuntabilitas korporasi, transparansi dalam pelaporan keuangan,³ memperkecil kemungkinan bagi perusahaan atau organisasi untuk melakukan dan menyembunyikan *fraud*, serta membuat perhatian pada tingkat sangat tinggi terhadap *corporate governance*. Saat ini, *corporate governance* dan pengendalian

internal bukan lagi sesuatu yang mewah lagi; karena kedua hal ini telah disyaratkan oleh undang-undang!⁴

Hal-hal yang Diatur dalam *Sarbanes-Oxley Act*

Dalam *Sarbanes-Oxley Act* diatur tentang akuntansi, pengungkapan dan pembaharuan *governance*; yang mensyaratkan adanya pengungkapan yang lebih banyak mengenai informasi keuangan, keterangan tentang hasil-hasil yang dicapai manajemen, kode etik bagi pejabat di bidang keuangan, pembatasan kompensasi eksekutif, dan pembentukan komite audit yang independen. Selain itu diatur pula mengenai hal-hal sebagai berikut:

- Menetapkan beberapa tanggung jawab baru kepada dewan komisaris, komite audit dan pihak manajemen
- Mendirikan *the Public Company Accounting Oversight Board*, sebuah dewan yang independen dan bekerja *full-time* bagi pelaku pasar modal
- Penambahan tanggung jawab dan anggaran SEC secara signifikan
- Mendefinisikan jasa “non-audit” yang tidak boleh diberikan oleh KAP kepada klien
- Memperbesar hukuman bagi terjadinya *corporate fraud*
- Mensyaratkan adanya aturan mengenai cara menghadapi *conflicts of interest*
- Menetapkan beberapa persyaratan pelaporan yang baru.

Dalam hal pelaporan, *Sarbanes-Oxley Act* mewajibkan semua perusahaan publik untuk membuat suatu sistem pelaporan yang memungkinkan bagi pegawai atau pengadu (*whistleblowers*) untuk melaporkan terjadinya penyimpangan. Sistem pelaporan ini diselenggarakan oleh komite audit. Perusahaan dapat menggunakan jasa pelaporan *hotlines* seperti *ACFE's EthicsLine*. ACFE dapat membantu menyusun *hotlines* pengaduan yang akan menerima dan merahasiakan pengaduan, dan memberikan informasi kepada perusahaan agar dapat mengambil tindakan yang tepat. Sistem *hotlines* ini akan mendorong para pegawai untuk melaporkan karena mereka merasa aman dari tindakan pembalasan dari yang dilaporkan, dan inilah elemen penting dan kritis bagi program pencegahan *fraud* yang kuat (*a robust fraud prevention program*).

Sarbanes-Oxley Act juga meningkatkan program perlindungan bagi pegawai yang menjadi pengadu atau pemberi informasi, yang mendapatkan perlakuan buruk dari perusahaannya setelah membeberkan adanya *fraud* dan membantu investigasi seperti: dipecat, didemosikan, diskors, diancam, dilecehkan dan berbagai perlakuan diskriminatif lainnya. Pegawai tersebut dapat mencari perlindungan melalui Departemen Tenaga Kerja

dan pengadilan distrik setempat. Dengan adanya undang-undang ini, tindakan pembalasan terhadap pengadu dianggap sebagai pelanggaran Federal (*a Federal offense*) sehingga terdapat konsekuensi hukum pidana bagi orang yang melakukannya berupa hukuman penjara sampai dengan 10 tahun!

Adapun perusahaan atau organisasi yang diatur oleh *Sarbanes-Oxley Act* antara lain: perusahaan-perusahaan yang sahamnya telah diregistrasi berdasarkan *Section 12 of the Exchange Act of 1934*, perusahaan-perusahaan yang wajib membuat laporan diregistrasi berdasarkan *Section 15(d) of the Exchange Act*, perusahaan-perusahaan yang sedang dalam proses registrasi, dan Kantor Akuntan Publik yang menerbitkan laporan audit. Undang-undang ini tidak mengecualikan perusahaan asing yang *listing* di Amerika Serikat dan KAP dari luar Amerika Serikat yang menerbitkan laporan auditnya bagi perusahaan tersebut.

Persyaratan bagi independensi auditor yang diatur dalam *Sarbanes-Oxley Act* diantaranya: menghindari beberapa aktivitas yang dilarang (§201), semua jasa audit harus telah disetujui oleh komite audit, adanya rotasi dari partner yang melakukan audit, menghindari konflik kepentingan, dan penelaahan oleh *Comptroller General* terhadap dampak potensial dari rotasi yang telah diwajibkan.

Komite Audit

Dalam kaitan tanggung jawab korporasi, Komite Audit mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

- Melakukan seleksi, menghitung kompensasi dan mengawasi KAP yang mengaudit korporasi
- Menjadi anggota independen dalam dewan komisaris
- Menyelenggarakan prosedur untuk menangani komplain-komplain yang berkaitan dengan akuntansi, pengendalian internal, dan hal-hal lain yang berkaitan dengan audit
- Menelaah dan menyetujui jasa audit dan jasa-jasa lain yang diberikan oleh KAP.

Public Company Accounting Oversight Board

Dewan ini dibentuk berdasarkan *Sarbanes-Oxley Act Title I* yang berbunyi: “...to oversee the audit of public companies that are subject to the securities laws.” Dewan ini mempunyai 5 orang anggota yang dipilih oleh SEC setelah berkonsultasi dengan Menteri Keuangan (*Secretary of Treasury*) dan Gubernur Bank Sentral (*Chairman of the Federal Reserve Board*). Tugas-tugas dari dewan ini antara lain:

- Melakukan registrasi terhadap KAP yang mengaudit perusahaan publik

- Menetapkan atau mengadopsi, atau melakukan keduanya: standar audit, *quality control*, etika, independensi, dan beberapa standar lain yang berkaitan dengan proses audit
- Melaksanakan inspeksi terhadap KAP-KAP
- Melakukan investigasi, penegakan disiplin dan pengenaan sanksi terhadap KAP dan partner dari KAP yang melakukan pelanggaran
- Melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi lain sebagai dewan yang dianggap perlu demi kepentingan publik.

SAS NO. 99

Statement on Auditing Standard (SAS) No. 99 – Consideration of Fraud in a Financial Statement Audit diterbitkan pada bulan Desember 2002 menggantikan SAS No. 82 dengan judul yang sama. SAS No. 99 ini merupakan Pernyataan Standar Audit signifikan yang pertama kali diterbitkan setelah diundangkannya *Sarbanes-Oxley Act*. Pernyataan ini menegaskan kembali tanggungjawab auditor yang telah dinyatakan dalam SAS No. 1 – *Codification of Auditing Standards and Procedures* dan SAS No. 82, yaitu:⁵

“The auditor has a responsibility to plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement, whether caused by error or fraud.”

SAS No. 99 ini efektif bagi audit keuangan untuk periode yang dimulai pada atau setelah 15 Desember 2002. Perincian detail dari SAS No. 99 ini bisa didapatkan di www.aicpa.org. Secara garis besar komponen dari SAS No. 99 adalah:

- ☞ Deskripsi dan karakteristik-karakteristik dari *fraud*.
- ☞ Kecurigaan secara profesional (*professional scepticism*).
- ☞ Diskusi di antara tim audit yang ditugaskan.
- ☞ Mendapatkan informasi dan bukti audit.
- ☞ Mengidentifikasi risiko-risiko.
- ☞ Penilaian risiko-risiko yang telah diidentifikasi.
- ☞ Tanggapan terhadap penilaian risiko.
- ☞ Mengevaluasi bukti dan informasi audit.
- ☞ Mengkomunikasikan *fraud* yang mungkin terjadi.
- ☞ Mendokumentasikan hal-hal yang berkaitan dengan *fraud*.

Sejalan dengan SAS No. 99 ini, *the American Institute of Certified Public Accountants (AICPA)* telah membentuk *Fraud Task Force of the AICPA’s Auditing Standards Board* yang bertugas untuk melakukan studi tentang pencegahan dan pendeteksian *fraud* dengan

disponsori oleh *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* dan beberapa organisasi lain yakni IMA, IIA, dan FEI. Hasilnya pada bulan November 2002 telah mengeluarkan *Management Antifraud Programs and Control – Guidance to Help Prevent and Deter Fraud*. Inti pesan dari dokumen ini adalah setiap organisasi harus segera mengambil langkah proaktif untuk mencegah dan menanggulangi terjadinya *fraud* demi integritas keuangan, reputasi dan masa depan organisasi.

Dengan mengacu kepada pengalaman Amerika Serikat di atas, apalagi mengingat keterpurukan perekonomian Indonesia salah satunya disebabkan oleh buruknya *corporate governance* dan semakin banyak perusahaan Indonesia *go public* di dalam maupun luar negeri, seyogyanya pihak-pihak yang berkompeten seperti DPR, Departemen Keuangan (Bapepam), dan Ikatan Akuntan Indonesia segera membuat undang-undang dan peraturan yang serupa dengan *Sarbanes-Oxley Act* dan *SAS No. 99*.

¹ Ronald L. Hagenbaugh, CFE, CPA, *Corporate Governance and Sarbanes-Oxley – What You Need to Know*, 14th Annual Fraud Conference, Main Conference, Chicago, Illinois, August 7-8, 2003, hlm. 1.

² Michael M. Ryman, M.A., CFE, *Protecting the Public: Anti-fraud Techniques that Work*, 14th Annual Fraud Conference, Main Conference, Chicago, Illinois, August 7-8, 2003, hlm. 1.

³ Martin T. Biegelman, CFE, *Developing a Robust Fraud Prevention Program*, Annual Fraud Conference, Main Conference, Chicago, Illinois, August 7-8, 2003, hlm. 8.

⁴ Ronald L. Hagenbaugh, CFE, CPA, *Loc. Cit.*

⁵ Association of Certified Fraud Examiners (ACFE), 14th Annual Fraud Conference, Post Conference, Fraud Responsibilities for Accountants and Auditors, Chicago, Illinois, August 7-8, 2003, hlm. 1.